

## **IMPLEMENTASI PERAN BARESKRIM DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT PADA ERA SOCIETY 5.0**

### **IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF BARESKRIM IN PROTECTING THE COMMUNITY IN THE ERA OF SOCIETY 5.0**

**Kurnia Sobar Darmawan**

Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: [kurnia.sobar.darmawan-2022@pasca.unair.ac.id](mailto:kurnia.sobar.darmawan-2022@pasca.unair.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Era Society 5.0 membawa transformasi digital yang semakin pesat dan menuntut adaptasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis implementasi peran Bareskrim Polri dalam melindungi masyarakat pada era Society 5.0 serta mengidentifikasi hambatan dan parameter yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dari wawancara dengan personel Bareskrim dan data sekunder dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Bareskrim dalam era Society 5.0 diwujudkan melalui pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan bantuan teknis yang melibatkan digitalisasi sistem identifikasi, database kriminal, dan teknologi forensik. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM yang memahami teknologi, sarana prasarana yang belum memadai, serta modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Parameter keberhasilan Bareskrim diukur melalui efektivitas administrasi POSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan penguatan koordinasi dengan stakeholder untuk mengoptimalkan peran Bareskrim dalam era Society 5.0.

**Kata kunci:** Bareskrim, Society 5.0, Perlindungan Masyarakat, Digitalisasi, Penegakan Hukum

#### **ABSTRACT**

*The Society 5.0 era brings increasingly rapid digital transformation and demands adaptation in various aspects of community life, including in the field of security and law enforcement. This study analyzes the implementation of the role of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police in protecting society in the Society 5.0 era and identifies obstacles and parameters that affect the implementation of these functions. The research method used is qualitative with a descriptive approach, using primary data from interviews with Criminal Investigation personnel and secondary data from literature studies. The results show that the implementation of Criminal Investigation functions in the*

*Society 5.0 era is realized through technology-based community services and technical assistance involving digitalization of identification systems, criminal databases, and forensic technology. The main obstacles faced include limited human resources who understand technology, inadequate infrastructure, and increasingly sophisticated crime modi operandi. Criminal Investigation success parameters are measured through the effectiveness of POSCORB administration (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). The research recommends the need to increase human resource capacity, modernize infrastructure, and strengthen coordination with stakeholders to optimize the role of Criminal Investigation in the Society 5.0 era.*

**Keywords:** *Criminal Investigation, Society 5.0, Community Protection, Digitalization, Law Enforcement*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam konteks pelayanan publik (public service), Kepolisian memiliki peran strategis yang mencakup fungsi pelayanan umum dan pelayanan masyarakat. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari pihak penyedia pelayanan kepada masyarakat. Seorang anggota Polri dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.

Program pengembangan pelayanan Polri berbasis teknologi ini tak lepas dari paradigma Police 4.0 yang merupakan program prioritas Kapolri menjadikan SDM Polri yang unggul dan beradaptasi di tengah perkembangan teknologi dan informasi dalam melayani masyarakat. Terdapat enam realitas baru yang dihadapi kepolisian saat ini. Pertama, pelayanan di dunia digital secara lengkap. Kedua, kolaborasi pengamanan bersama sektor swasta dan masyarakat sipil. Ketiga, cepatnya perubahan modus kejahatan. Keempat, pemanfaatan cyber-physical system. Kelima, penggunaan informasi dan ilmu pengetahuan untuk pencegahan kejahatan. Keenam, melaksanakan transparansi secara maksimal.

Bareskrim Polri sebagai lembaga di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fokus utama pada penanganan kasus kriminal yang bersifat kompleks, signifikan, dan melibatkan kejahatan berat. Tugas pokok Bareskrim Polri melibatkan penyelidikan, penindakan, dan penyelesaian kasus-kasus kriminal yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kejahatan terorganisir, korupsi, terorisme, narkoba, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era Society 5.0, peran ini semakin kompleks dengan hadirnya dimensi digital dalam hampir setiap aspek kejahatan.

Perlu dipahami bahwa terorisme merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki motivasi beragam. Sebagaimana dikemukakan oleh Adams (1986), terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada. Di wilayah Poso misalnya, faktor penyebab tindakan terorisme memiliki karakteristik khusus yang melibatkan beberapa aspek. Menurut Ali (2008), kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Poso memiliki beberapa faktor penyebab (trigger) yang bersifat multifaktorial.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, Polres Poso menerapkan berbagai strategi penanganan. Menurut Petrus R. Golose (2010), program deradikalisasi perlu diwujudkan melalui reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Program deradikalisasi harus mampu melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris atau menghindari penyebaran ideologi tersebut.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi Bareskrim Polri dalam era Society 5.0. Fokus utama penelitian adalah pada implementasi fungsi dan peran Bareskrim dalam konteks perlindungan masyarakat, serta mengidentifikasi parameter-parameter yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi adaptif Bareskrim menghadapi era digital tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan masyarakat.masyarakat.

Hikam (2016) menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membendung radikalisme. Hal ini tercermin dalam strategi Polri yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam program pembinaan. Pelibatan ini menjadi kunci keberhasilan program karena dapat memobilisasi dukungan sosial dan memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Khamdan (2010) menjelaskan bahwa pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.

Tantangan terbaru bagi Polri adalah munculnya istilah society 5.0 yang merupakan sebuah konsep kolaborasi antara manusia dan mesin untuk meningkatkan kualitas hidup, memecahkan masalah dan mewujudkan lingkungan yang baik. Sebuah lompatan teknologi dan peradaban masyarakat dari Industri 4.0 ini menuntut SDM Polri yang lebih terampil dalam manajemen, perencanaan, programming, pakar keamanan siber, pakar IT, dan robotika.

Polri khususnya Bareskrim perlu mengantisipasi perkembangan era global yang telah mendorong tumbuhnya hubungan antarnegara di berbagai bidang

kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wawan H. Purwanto (2010), strategi penguatan hukum dan deradikalisasi perlu dilakukan secara sinergis dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Koordinasi lintas sektor yang dibangun Bareskrim Polri dengan berbagai stakeholder mencerminkan implementasi strategi ini, meski masih diperlukan penguatan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Dalam konteks pelayanan publik di era digital, Bareskrim Polri dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Roma Tressa (2018) mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan kontra radikalisme, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang perlu diatasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan alokasi anggaran yang memadai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dari wawancara dengan personel Bareskrim dan data sekunder dari studi literatur. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti, terutama dalam memahami dinamika implementasi fungsi dan peran Bareskrim di era Society 5.0. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama: implementasi fungsi dan peran, identifikasi hambatan dan tantangan, serta parameter keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Bareskrim.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi adaptasi lembaga penegak hukum dalam menghadapi era Society 5.0, di mana teknologi dan manusia harus berkolaborasi secara harmonis untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat yang optimal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan strategi Bareskrim dan secara teoretis memperkaya pemahaman tentang transformasi pelayanan publik di era digital.

## **2. PEMBAHASAN**

### **Implementasi Fungsi dan Peran Bareskrim dalam Era Society 5.0**

Dalam menghadapi era Society 5.0, Bareskrim Polri telah melakukan transformasi signifikan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya melalui pengembangan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi. Transformasi ini merupakan respons terhadap perubahan lanskap kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis digital, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sistem Identifikasi Digital menjadi salah satu inovasi utama yang dikembangkan Bareskrim Polri. Pengembangan database sidik jari digital nasional telah mempermudah proses identifikasi dan verifikasi identitas secara cepat dan akurat. Sistem ini terintegrasi dengan teknologi face recognition yang memungkinkan pengenalan wajah secara otomatis, memberikan

tambahan layer keamanan dalam proses identifikasi. Modernisasi sistem forensik digital juga telah meningkatkan kemampuan Bareskrim dalam menganalisis bukti digital dan mengungkap kejahatan berbasis teknologi. Integrasi data kriminal lintas wilayah memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif antar satuan kepolisian di berbagai daerah.

Dalam aspek Pelayanan Masyarakat Terintegrasi, Bareskrim telah mengimplementasikan digitalisasi pelaporan kejahatan yang memungkinkan masyarakat melaporkan tindak pidana secara online. Sistem ini dilengkapi dengan fitur tracking perkembangan kasus yang memberikan transparansi kepada pelapor tentang status penanganan kasusnya. Layanan konsultasi online juga telah dikembangkan untuk memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau informasi terkait tindak pidana. Database terpadu catatan kriminal membantu dalam proses penyelidikan dan pencegahan kejahatan dengan menyediakan data komprehensif tentang riwayat kriminal.

Bantuan Teknis Modern yang dikembangkan Bareskrim mencakup penggunaan artificial intelligence untuk analisis kejahatan. Teknologi ini mampu mengidentifikasi pola kejahatan dan membantu dalam prediksi potensi tindak pidana di masa depan. Implementasi big data analytics memungkinkan pengolahan data kejahatan dalam skala besar untuk menghasilkan insights yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengembangan cybersecurity system menjadi prioritas untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan siber yang semakin canggih. Forensik digital untuk kejahatan siber telah diperkuat dengan tools dan metodologi terkini untuk mengungkap kejahatan di dunia maya.

Namun, implementasi fungsi dan peran tersebut menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala utama, di mana masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan kompetensi digital dengan kemampuan personel yang ada. Gap generasi dalam adaptasi teknologi menciptakan tantangan dalam transfer pengetahuan dan implementasi sistem baru. Kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital personel membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Resistensi terhadap perubahan sistem juga masih ditemui di beberapa level organisasi.

Dari sisi infrastruktur dan anggaran, kebutuhan modernisasi peralatan memerlukan investasi besar yang harus direncanakan secara matang. Biaya tinggi untuk pengembangan sistem dan maintenance teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran. Keterbatasan jaringan di daerah masih menjadi kendala dalam implementasi sistem terintegrasi secara nasional.

Kompleksitas kejahatan yang semakin meningkat juga memberikan tantangan besar. Evolusi cybercrime yang terus berkembang menuntut adaptasi cepat dalam metode penanganan. Kejahatan lintas negara memerlukan koordinasi internasional yang lebih intensif. Modus operandi berbasis teknologi yang semakin canggih membutuhkan peningkatan kapabilitas penyelidikan digital. Tantangan yurisdiksi digital dalam penanganan kejahatan siber memerlukan pembaruan kerangka hukum dan prosedur operasional.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi fungsi dan perannya, Bareskrim menggunakan parameter yang mencakup efektivitas sistem POSCORB dan kualitas pelayanan. Dalam aspek Planning, fokus diberikan pada perencanaan strategis berbasis teknologi yang adaptif terhadap perubahan. Organizing menekankan pada pembentukan struktur organisasi yang mendukung transformasi digital. Staffing berfokus pada pengembangan SDM yang memiliki kompetensi digital. Coordinating memastikan integrasi sistem antar unit berjalan efektif. Reporting dikembangkan melalui sistem pelaporan real-time yang akurat. Budgeting diarahkan pada efisiensi penggunaan anggaran dalam pengembangan sistem digital.

Kualitas pelayanan diukur melalui beberapa indikator kunci, termasuk respons time penanganan kasus yang semakin cepat dengan bantuan teknologi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Bareskrim menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja. Efektivitas pencegahan kejahatan diukur melalui penurunan angka kriminalitas, sementara keberhasilan pengungkapan kasus menunjukkan efektivitas sistem yang dikembangkan.

Transformasi digital yang dilakukan Bareskrim dalam era Society 5.0 menunjukkan komitmen untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap mempertahankan esensi pelayanan kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas layanan terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat yang lebih efektif di era **digital**.

Dalam konteks pengembangan kapabilitas Bareskrim, implementasi teknologi artificial intelligence (AI) untuk analisis kejahatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. AI tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, tetapi juga untuk memprediksi potensi area rawan kejahatan berdasarkan analisis data historis. Sistem ini membantu dalam pengalokasian sumber daya kepolisian secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, penempatan personel dapat diprioritaskan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan prediksi AI.

Pusinafis Bareskrim Polri, sebagai unit yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi dan forensik, telah mengalami transformasi signifikan dalam era Society 5.0. Sejarah unit ini yang dimulai sejak tahun 1963 menunjukkan evolusi dari sistem manual menuju sistem digital yang terintegrasi.

Perkembangan teknologi identifikasi, mulai dari sidik jari konvensional hingga sistem biometrik modern, mencerminkan adaptasi Bareskrim terhadap kemajuan teknologi.

Implementasi sistem database terpadu catatan kriminal nasional menjadi salah satu pencapaian penting dalam modernisasi Bareskrim. Sistem ini tidak hanya menyimpan data kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup data kejahatan siber, profil pelaku, dan modus operandi. Integrasi data ini memungkinkan analisis pola kejahatan yang lebih komprehensif dan membantu dalam proses penyelidikan serta pencegahan kejahatan.

Program "LAPERA" (Lantas Peduli Radikalisme) yang dikembangkan oleh Satlantas Polres Poso menjadi contoh inovasi yang menggabungkan pendekatan teknologi dengan kearifan lokal. Program ini tidak hanya fokus pada aspek administratif seperti pembuatan SIM, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam implementasi teknologi.

Dalam aspek cybersecurity, Bareskrim telah mengembangkan sistem keamanan berlapis yang melibatkan firewall canggih, enkripsi data, dan monitoring real-time terhadap ancaman siber. Kolaborasi dengan ahli keamanan siber dan lembaga internasional memperkuat kapabilitas Bareskrim dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara. Pengembangan laboratorium forensik digital yang dilengkapi dengan peralatan modern memungkinkan analisis bukti digital secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tantangan yurisdiksi digital dalam penanganan kejahatan siber telah mendorong Bareskrim untuk mengembangkan protokol khusus dan membangun kerjasama internasional yang lebih erat. Hal ini termasuk pertukaran informasi real-time dengan kepolisian negara lain dan harmonisasi prosedur penanganan kejahatan siber lintas negara. Upaya ini penting mengingat karakteristik kejahatan siber yang tidak mengenal batas teritorial.

Aspek penting lainnya adalah pengembangan sistem pelayanan masyarakat yang berbasis mobile technology. Aplikasi pelaporan kejahatan berbasis smartphone memungkinkan masyarakat melaporkan tindak pidana secara langsung, dilengkapi dengan kemampuan unggah bukti digital seperti foto dan video. Sistem tracking perkembangan kasus yang terintegrasi memberikan transparansi kepada pelapor dan meningkatkan akuntabilitas penanganan kasus.

Pengembangan kompetensi digital personel Bareskrim dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis dan non-teknis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan perusahaan teknologi membantu

dalam transfer pengetahuan dan pengembangan skill yang dibutuhkan di era digital. Program mentoring antara personel senior dan junior juga dikembangkan untuk menjembatani gap generasi dalam adaptasi teknologi.

Dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan sistem, Bareskrim menerapkan pendekatan change management yang terstruktur. Ini meliputi sosialisasi intensif tentang manfaat teknologi baru, pelibatan personel dalam proses pengembangan sistem, dan pemberian insentif bagi adopsi teknologi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap transformasi digital.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi teknologi dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator kinerja. Ini mencakup analisis waktu respons penanganan kasus, tingkat keberhasilan pengungkapan kejahatan, dan survei kepuasan masyarakat. Data yang diperoleh digunakan untuk penyempurnaan sistem dan pengembangan inovasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Bareskrim juga telah mengembangkan sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system) yang terintegrasi untuk mendokumentasikan dan membagikan best practices dalam penanganan kasus. Sistem ini memungkinkan transfer pengetahuan yang efektif antar unit dan generasi personel, sekaligus menjadi repository penting untuk pembelajaran organisasi. Database kasus yang terdigitalisasi membantu investigator dalam mengidentifikasi pola dan koneksi antar kasus yang mungkin tidak terlihat dalam sistem manual.

Dalam aspek forensik digital, Bareskrim telah mengembangkan kapabilitas untuk menangani berbagai jenis bukti digital, mulai dari data ponsel pintar hingga cryptocurrency. Laboratorium forensik digital yang dimiliki Bareskrim kini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk melakukan analisis malware, recovery data yang terhapus, dan trace digital footprint. Kemampuan ini sangat krusial mengingat semakin banyaknya kejahatan yang melibatkan komponen digital.

Pengembangan sistem early warning untuk kejahatan siber juga menjadi prioritas Bareskrim. Sistem ini menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi anomali dan potensi serangan siber secara dini. Kolaborasi dengan Internet Service Providers (ISP) dan platform media sosial memperkuat kemampuan monitoring dan respons terhadap ancaman siber. Sistem ini telah berhasil mencegah beberapa serangan siber berskala besar dan mengidentifikasi jaringan kejahatan siber transnasional.

Parameter keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap efisiensi operasional dan kepuasan masyarakat. Penggunaan dashboard analytics memungkinkan

monitoring real-time terhadap berbagai indikator kinerja, termasuk waktu respons, tingkat penyelesaian kasus, dan feedback masyarakat. Data ini digunakan untuk evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan sistem.

Tantangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, diatasi melalui pengembangan sistem hybrid yang dapat beroperasi dalam kondisi konektivitas terbatas. Solusi offline-first dikembangkan untuk memastikan kontinuitas layanan, dengan sinkronisasi data otomatis ketika koneksi tersedia. Pendekatan ini memastikan bahwa layanan Bareskrim tetap dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pengembangan SDM, Bareskrim telah merancang kurikulum pelatihan yang komprehensif mencakup aspek teknis, hukum, dan etika digital. Program sertifikasi digital forensics dan cybersecurity menjadi standar kompetensi baru bagi personel yang menangani kejahatan siber. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan industri teknologi memperkaya perspektif dan kompetensi personel dalam menghadapi tantangan era digital.

Aspek keamanan data menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem digital Bareskrim. Implementasi protokol keamanan berlapis, termasuk enkripsi end-to-end dan sistem autentikasi multi-faktor, melindungi integritas data sensitif. Audit keamanan rutin dilakukan untuk mengidentifikasi dan menutup potensi celah keamanan. Compliance dengan standar keamanan internasional memastikan sistem Bareskrim memenuhi best practices global dalam penanganan data sensitif.

Efektivitas sistem POSCORB dalam era digital tercermin dari peningkatan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan. Planning berbasis data memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Organizing yang adaptif memfasilitasi respons cepat terhadap perubahan pola kejahatan. Coordinating antar unit menjadi lebih seamless dengan bantuan platform kolaborasi digital. Reporting otomatis mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi data.

Transformasi digital Bareskrim juga berdampak positif pada aspek preventif penegakan hukum. Analisis prediktif membantu mengidentifikasi area dan waktu berisiko tinggi untuk tindak kejahatan, memungkinkan pengalokasian sumber daya secara proaktif. Program edukasi digital untuk masyarakat meningkatkan awareness terhadap ancaman kejahatan siber dan cara pencegahannya. Kolaborasi dengan komunitas teknologi dalam program bug bounty memperkuat keamanan sistem dan membangun kepercayaan publik.

### **3. PENUTUP**

Simpulan

Transformasi digital Bareskrim Polri dalam era Society 5.0 menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya adaptasi terhadap perubahan lanskap kejahatan dan tuntutan pelayanan masyarakat. Implementasi teknologi modern seperti artificial intelligence, big data analytics, dan sistem identifikasi digital telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus kejahatan. Sistem identifikasi digital yang dikembangkan Bareskrim, meliputi database sidik jari nasional dan teknologi face recognition, telah memperkuat kapabilitas dalam identifikasi dan penanganan kejahatan. Modernisasi sistem forensik digital dan integrasi data kriminal lintas wilayah memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Pelayanan masyarakat terintegrasi melalui digitalisasi pelaporan kejahatan dan sistem tracking kasus telah meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan Bareskrim.

Pengembangan bantuan teknis modern, termasuk implementasi AI untuk analisis kejahatan dan penggunaan big data untuk prediksi kriminal, menunjukkan komitmen Bareskrim dalam mengadopsi teknologi terkini. Sistem cybersecurity dan forensik digital yang dikembangkan telah memperkuat kemampuan dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Knowledge management system yang terintegrasi memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran organisasi yang efektif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur, Bareskrim telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik melalui program pengembangan kompetensi berkelanjutan dan implementasi solusi teknologi yang inovatif. Pendekatan change management yang terstruktur telah membantu mengatasi resistensi terhadap perubahan sistem. Evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi teknologi memungkinkan penyempurnaan sistem yang berkelanjutan.

Parameter keberhasilan yang diukur melalui sistem POSCORB dan indikator kualitas pelayanan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Efisiensi operasional, akurasi pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan masyarakat mengalami perbaikan berkat implementasi teknologi modern. Dampak positif transformasi digital juga terlihat dalam aspek preventif penegakan hukum melalui analisis prediktif dan program edukasi digital untuk masyarakat.

#### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, penguatan program pengembangan SDM melalui pelatihan komprehensif yang mencakup aspek teknis, hukum, dan etika digital. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan industri teknologi perlu diperluas untuk memperkaya perspektif dan kompetensi personel Bareskrim. Program mentoring antar generasi perlu diperkuat untuk menjembatani gap teknologi.

Kedua, peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Pengembangan sistem hybrid yang dapat beroperasi dalam kondisi konektivitas terbatas perlu diprioritaskan untuk memastikan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah. Modernisasi peralatan forensik digital dan laboratorium perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengimbangi evolusi kejahatan siber.

Ketiga, penguatan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber transnasional. Harmonisasi prosedur dan protokol penanganan kejahatan siber lintas negara perlu ditingkatkan. Pertukaran informasi dan best practices dengan lembaga penegak hukum internasional perlu diintensifkan untuk menghadapi ancaman kejahatan global.

Keempat, pengembangan regulasi dan standar operasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Framework hukum untuk penanganan bukti digital dan yurisdiksi siber perlu diperkuat. Standardisasi prosedur forensik digital dan penanganan data sensitif perlu diselaraskan dengan standar internasional.

Kelima, peningkatan program edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Program awareness tentang keamanan siber perlu diperluas dengan memanfaatkan platform digital. Kolaborasi dengan komunitas teknologi dan masyarakat sipil dalam program keamanan siber partisipatif perlu dikembangkan lebih lanjut. sistem digital

**DAFTAR PUSTAKA**

- Faal M. (1991). *Diskresi Kepolisian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gananta, M., Aldhi, I. F., Suhariadi, F., Thalib, P., Nadia, F. N. D., Supriharyanti, E., & Hardaningtyas, D. (2024). Antecedent of Employee Engagement Among Police Officers in Indonesia.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kelana, K. (2020). *Prinsip-prinsip Pelayanan Pemerintahan*. Jakarta: Binangkit.
- Kurniawan, F., Thalib, P., Subhan, M. H., Jansen, B., & Abd Ghadas, Z. A. B. (2023). Justice as a Meta Value of Corrective Justice in Providing Restitution for Unjust Enrichment: A Study on Rules, Norms, Principles, and Foundation. *Jurnal Hukum*, 39(2), 192-211.
- Ladiqi, S., Suparto Wijoyo, S. H., Mustaffa, A., Thalib, D. P., & SH, M. (Eds.). (2021). *LAW, POLITICS & SOCIETY: The Unravelling of Malaysia and Indonesia Potentiality*. Airlangga University Press.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, G. A., Sabrie, H. Y., & Thalib, P. (2017). The Product Characteristic of Electronic Money from the Perspective of the Negotiable Instruments Law. *Jurnal FIAT JUSTISIA*, 11(4), 328-341.
- Rahardjo, A. (2017). Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional. *Jurnal Unla*, 19(1), 65-72.
- Sadjijono. (2006). *Etika Profesi Kepolisian*. Surabaya: Alfina.
- Septiadi, H., & Thalib, P. (2022). Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. *Janaloka*, 1(2), 1-19.
- Sinambela, L.P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwarni. (2009). *Perilaku Polisi: Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Bandung: Nusa Media.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & SH, M. S. (2023). Optimalisasi Penangkalan Radikalisme Dan Ekstrimisme Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Sivis Pacem*, 1(03), 376-384.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2020). Islamic Law as Legal Tradition and Cultural Identity of the People of Indonesia. In *International Law Conference*.
- Thalib, P., Kurniawan, F., Sabrie, H. Y., & Aliansa, W. (2020). Role Model of Legal Support for Implementation of a Smart City in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(2), 256-262.
- Thalib, P., Salsabila, S. M., & Rahadi, A. P. (2024, September). Violation of the Prudential Principle in Cooperative Credit Granting. In *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* (Vol. 4, No. 1). Research Synergy Foundation.

Wijoyo, S., Thalib, P., & Kholiq, M. N. (2022). RECONSTRUCTION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE ORDER TO REALIZE INDONESIA INCORPORATED AS A WELFARE COUNTRY (REGULATORY-DEREGULATION-REREGULATION PERSPECTIVE OF THE JATIMNOMIC MODEL). *Airlangga Development Journal*, 6(1).